

## INTERNET DALAM PROSES MENGAJAR DAN BELAJAR

Oleh

**Zainal Arifin**

(Bahasa Inggris, PBS, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak)

E-mail: zain\_dos@yahoo.com

**Abstrak:** Information and Communication Technology (ICT) sebagai suatu teknologi baru telah merambah jauh ke hampir setiap aspek kehidupan manusia di muka bumi ini. Ke dalam dunia pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, ICT telah membawa perubahan yang luar biasa yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Salah satu perubahan yang terjadi adalah kecanggihan teknologi internet yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di mana seorang pelajar bisa dengan mudahnya mendapatkan materi apa saja yang dia ingin pelajari hanya dalam hitungan detik. Demikian pula sebaliknya seorang pengajar bisa memperoleh bahan ajar yang telah didesain jauh lebih menarik serta up-to date yang dia perlukan kemudian bahkan bisa langsung dia sajikan dalam hitungan detik, tanpa harus datang ke ruang kelas konvensional dan tradisional seperti yang masih banyak kita lakukan sekarang ini. Oleh karena itu, pemahaman akan cara dan pemanfaatan internet ini perlu kita kembangkan untuk diaplikasikan dalam dunia pendidikan.

**Kata Kunci:** ICT, internet, pendidikan, belajar mengajar

### Pendahuluan

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebenarnya kita sedang mengalami dan menghadapi ujian berat. Berbagai krisis silih berganti seolah tiada henti melanda dan menerpa negeri ini. Belum selesai krisis yang satu sudah muncul krisis yang lain. Mulai dari **krisis bencana alam** (*banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, tsunami*), **krisis sosial** (*tawuran dan konflik kekerasan*), **krisis ekonomi** (*krisis moneter dan perbankan*), **krisis hukum** (*mafia kasus hukum dan peradilan*), **krisis politik** (*ketidakpercayaan terhadap elit politik dan pemerintah, politik tak beretika, carut marut berdemokrasi*), dan **krisis ideologi** (*separatisme ideologi dan*

*terorisme*), yang kesemua krisis itu berpangkal dari **krisis peradaban** (*memudarnya nilai-nilai kemanusiaan, kearifan sosial, kecerdasan sosial dan kompetensi sosial*). Pranowo (2006) dalam tulisannya tentang Revitalisasi Pancasila menggambarkan kondisi demikian itu sebagai suatu keadaan *seperti orang yang sedang mengalami sakit parah, terbaring di ICCU, sekarat dan sedang menunggu ajal*. Apa yang ditengarai Pranowo itu sesungguhnya menunjukkan keprihatinannya atas kondisi yang dihadapi bangsa sekaligus kerinduan dan kecintaannya yang amat mendalam akan perlunya melakukan langkah-langkah penyelamatan cepat dan tepat terhadap negeri ini agar negeri ini tetap dapat berdiri tegak, kokoh, gagah dan lestari.

Belum hilang dalam ingatan kita, bagaimana krisis multi dimensi tahun 1998 yang mememorakmorandakan berbagai sendi kehidupan negeri ini beberapa tahun silam, krisis itu belum sepenuhnya pulih, kini kita dihadapkan lagi kepada krisis baru yaitu krisis tahun 2008 yang tidak kalah masifnya. Meskipun menurut beberapa pengamat krisis tahun 2008 itu tidak sedahsyat dan tidak secara langsung menghantam negeri ini, tetapi fakta dampaknya tak kalah heboh dibandingkan krisis tahun 1998 sebelumnya. Salah satu buktinya adalah kasus Bank Century yang cukup hingar bingar diperdebatkan Pansus DPR beberapa waktu lalu dan kini kasusnya tengah disidik oleh para aparat penegak hukum negeri (*kepolisian, kejaksaan dan KPK*) dengan berbagai persoalan ikutannya sedikit banyak telah mempengaruhi berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demikian pula akan berbagai konflik kekerasan yang bernuansa horizontal (*etnik dan agama*) maupun yang bernuansa vertikal (*antara masyarakat dengan negara*) yang terjadi silih berganti di berbagai pelosok negeri beberapa waktu silam seperti di Poso, Ambon, Sambas, Sanggau Ledo, Sampit, Papua, Aceh dan sebagainya. Meskipun konflik kekerasan itu sudah cukup lama berlalu, tetapi dampaknya hingga kini masih membekas dan terasa. Sebagian para korban konflik kekerasan itu masih hidup dalam pengasingan dan pengungsian. Hubungan sosial antar sesama masih diwarnai prasangka dan stereotipe negatip sehingga sangat mudah menyulut dan memunculkan konflik kekerasan baru.

Kini setiap hari kita semakin akrab menyaksikan berita kekerasan dari berbagai sudut negeri melalui media massa cetak dan elektronik. Mungkin hampir tidak ada hari dilalui tanpa suguhan berita kekerasan. Berbagai macam kekerasan itu silih berganti, seperti kekerasan dalam keluarga, kekerasan rumah tangga, kekerasan di kelas, kekerasan di sekolah, kekerasan di kampus, tawuran antar pelajar, tawuran mahasiswa, tawuran antar kampung, tawuran para suporter, tawuran penonton konser, tawuran antar *gang*, hingga anarkisme mahasiswa di berbagai kampus dan anarkisme masyarakat dalam menyampaikan pendapat ketika melakukan demo dan sebagainya. Kekerasan-kekerasan itu bahkan sering dipicu hanya oleh persoalan sepele dan kadang sulit dimengerti oleh akal sehat. Semakin hari semakin tumbuh budaya kekerasan di tengah kita. Sepertinya kekerasan sudah menjadi sesuatu yang biasa dan lumrah, karena hampir tidak ada lagi ruang di sekeliling kita yang tanpa nuansa kekerasan. Tumbuhnya budaya kekerasan seperti itu seperti dikatakan Johan Galtung (2002), tiada lain sebagai akibat setiap persoalan selalu diselesaikan dengan cara kekerasan. Ironinya negara yang semestinya berfungsi mengayomi warganya ternyata melalui aparatnyapun sering melakukan kekerasan seperti melakukan ketidakadilan, penindasan, pemaksaan, pengusuran dan perampasan hak-hak rakyat.

Kita pun menyaksikan kekerasan dalam bidang hukum seperti semakin mudarnya kearifan pelaksanaan hukum di tengah masyarakat. Hukum semakin mudah diputarbalik-

kan dan diperjualbelikan oleh para aparat pelaksananya. Akibatnya terjadi ketidakpastian hukum dan runtuhnya keadilan hukum, sehingga yang benar bisa menjadi salah, sebaliknya yang salah menjadi benar. Penyelesaian perkara atau masalah yang selalu harus ditakar dan diselesaikan menggunakan hukum nasional (*hukum positif*) dan melalui jalur peradilan (*litigasi*), padahal hukum nasional (*hukum positif*) dan peradilan (*litigasi*) tidak selamanya mampu menyelesaikan perkara secara adil, bahkan justru sebaliknya. Seperti dikatakan Harron (2002) dari hasil penelitiannya justru memperlihatkan bahwa masyarakat sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi (*badan peradilan*). Masyarakat tidak puas atas sistem peradilan (*dissatisfied with the judicial system*), karena cara penyelesaian konflik yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele (*the delay inherent in a system*), cenderung membuang-buang waktu (*a waste of time*), biayanya sangat mahal (*very expensive*), mempermasalahakan masa lalu bukan menyelesaikan masa depan, membuat orang bermusuhan dan melumpuhkan para pihak yang bertikai. Proses pengadilan cenderung bersifat “*adversarial*” atau berlangsung atas dasar saling permusuhan antara para pihak dan selalu menghasilkan bentuk penyelesaian yang menempatkan salah satu pihak sebagai pemenang (*a winner*) dan pihak lain sebagai pihak yang kalah (*a loser*).

Dampak penyelesaian perkara yang selalu menggunakan hukum nasional (*hukum positif*) melalui badan peradilan (*litigasi*) mengakibatkan semakin membludaknya jumlah

penghuni rumah tahanan negara (*rutan*) dan Lembaga Pemasyarakatan (*LP*) di tanah air. Hampir semua rutan dan LP di tanah air telah kelebihan daya tampung bahkan ada yang sampai 600% dari daya tampung yang tersedia (Menkumham, 2010). Pertanyaannya haruskah semua perkara diselesaikan secara hukum nasional (*hukum positif*) melalui badan peradilan (*litigasi*), padahal di tiap komunitas masyarakat sudah tersedia mekanisme penyelesaian tersendiri, yang justru mungkin lebih adil dan manusiawi. Tidak bisakah mekanisme penyelesaian masyarakat itu digunakan sebagai media alternatif dalam menyelesaikan perkara, khususnya untuk perkara-perkara yang berskala kecil dan komunitas?

Berbagai krisis yang diungkapkan itu mengindikasikan dan menunjukkan kepada kita telah terjadinya krisis peradaban berupa penurunan nilai-nilai kemanusiaan, kearifan sosial, kecerdasan sosial dan kompetensi sosial dalam masyarakat selama ini sehingga kita semakin tidak mampu menyelesaikan krisis dan konflik di sekitar kita kendatipun krisis atau konflik itu sangat sederhana. Masyarakat telah kehilangan kearifan-kearifan sosial yang unggul, seperti kemampuan menghargai dan menghormati, kemampuan toleransi, kemampuan berempati, semangat dan kemampuan menolong, kemampuan menyelesaikan konflik, kemampuan musyawarah dan mufakat serta kemampuan bekerja sama. Sebaliknya masyarakat cenderung mudah menyalahkan orang lain ketimbang introspeksi diri, pengendalian emosi menurun, mudah tersinggung, cepat marah, gampang terpengaruh isu yang menyesatkan, dan gampang curiga

terhadap kelompok lain, sehingga kadang hanya karena persoalan sepele dapat berakibat pada konflik sosial yang berlarut-larut atau *protracted social conflict* (Azhar, 2000) dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta yang tidak sedikit. Terhadap kenyataan seperti ini, pertanyaannya bagaimana kita dapat memperbaikinya agar peradaban bangsa yang telah memudar itu dapat pulih kembali, apa yang harus kita lakukan?

Banyak pakar meyakini penyembuhan atas memudarnya nilai-nilai kemanusiaan, kearifan sosial, kompetensi sosial, kecerdasan sosial atau peradaban bangsa tersebut hanya efektif melalui jalur pendidikan, kendatipun hasil penyembuhannya akan berjalan lama. Jika memang harus melalui jalur pendidikan, pertanyaannya pendidikan seperti apa dan pendidikan yang bagaimana. Dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, pendidikan telah membuktikan dirinya menjadi alat yang paling ampuh dalam membebaskan suatu masyarakat atau bangsa dari kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan dan berbagai keterpurukan lainnya, terutama pendidikan yang dijalankan dalam nuansa damai atau yang membangun terciptanya perdamaian. Pendidikan merupakan jalan terbaik meningkatkan peradaban bangsa karena melalui pendidikan suatu masyarakat dapat menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sebagai pilarnya peradaban dan pilarnya perdamaian.

### **Pendidikan Perdamaian**

Memudarnya nilai-nilai kemanusiaan, kearifan sosial, kompetensi sosial dan kecerdasan sosial yang mengakibatkan terjadinya krisis

peradaban berkesinambungan di masyarakat dewasa ini diduga sedikit banyak berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan proses pembelajaran yang cenderung lebih mengedepankan *learning to know* dan *learning to do* yang dilaksanakan dalam suasana yang tidak damai. Banyak fakta menunjukkan proses pembelajaran yang berlangsung cenderung tidak damai dan belum menyentuh pada aspek *learning to live together* dan *learning to be* sebagaimana yang dianjurkan oleh UNESCO. Pelaksanaan pendidikan yang demikian itu menghasilkan manusia-manusia yang memiliki jiwa kekerasan dan hanya menguasai *hard-skill* atau *hard-competency* dan kurang pada penguasaan *soft-skill* atau *soft competency*. Padahal dalam realitas kehidupan yang senyatanya, dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, kedua skill atau kompetensi itu diperlukan secara seimbang.

Pendidikan yang lebih mengedepankan *learning to know* dan *learning to do* itu dalam perspektif taksonomi Bloom dikategorikan baru menyentuh pendidikan *kognitif* dan *psikomotorik*, itu pun kalau mau jujur baru menyentuh pada tingkat permukaan saja, belum sampai pada isi substansi sesungguhnya, apalagi untuk pendidikan *afektif*. Padahal pendidikan yang sejatinya, semestinya menyentuh seluruh aspek atau pilar tersebut secara utuh, menyeluruh, dan mendalam, lebih-lebih pada masyarakat plural seperti Indonesia ini.

Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, belajar untuk mampu hidup bersama orang lain (*learning to live together*) dan belajar menjadi manusia sesungguhnya

seutuhnya (*learning to be*) agar bermanfaat bagi diri dan orang lain sesungguhnya perlu mendapatkan perhatian serius selain belajar mampu mengetahui (*learning to know*) dan belajar mampu melakukan atau mampu mengerjakan sesuatu (*learning to do*). Bangsa ini sangat memerlukan manusia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan tinggi tetapi lebih dari itu kita pun memerlukan orang-orang yang mampu menjalin hidup bersama orang lain dan orang-orang yang benar-benar menjadi manusia utuh atau manusia yang berkepribadian sejati. Manusia yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan memiliki sikap mampu menghormati dan menghargai sesama seperti itu dapat dibangun melalui pendidikan perdamaian.

Pendidikan perdamaian sering juga disebut pendidikan mediasi resolusi konflik, pendidikan manajemen konflik, pendidikan transformasi konflik, pendidikan HAM dan pendidikan multikultural. Pendidikan-pendidikan ini bertujuan untuk mewujudkan nilai, perilaku dan cara hidup yang mendukung terciptanya budaya damai. Damai atau perdamaian identik dengan suasana tanpa kekerasan, adanya harmoni, toleransi, saling menghargai dan relasi yang setara antar individu maupun komunitas yang hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu wilayah tertentu pula.

Damai atau perdamaian berbeda bahkan berlawanan dengan konflik kekerasan, dan konflik kekerasan sendiri juga berbeda dengan konflik. Konflik adalah suatu keniscayaan yang melekat pada suatu masyarakat yang terdiri dari banyak individu yang memiliki keinginan,

kehendak dan kepentingan tertentu. Konflik seperti ini dalam batas tertentu sebenarnya diperlukan bagi tumbuh berkembangnya suatu komunitas menuju arah yang lebih baik. Sementara konflik kekerasan terjadi manakala berbagai keinginan, kehendak dan kepentingan tersebut berusaha dicapai atau dipertahankan dengan cara-cara yang merusak, baik merusak secara fisik, psikis maupun lingkungan.

Usaha menciptakan suasana damai dan budaya perdamaian dalam suatu komunitas adalah juga merupakan salah satu bagian dari pendidikan pengurangan resiko bencana. Walaupun keduanya berbeda dalam ranah kajiannya, bencana alam dan konflik kekerasan mempunyai titik singgung yang sama yaitu pada sejauh mana suatu komunitas memiliki mekanisme dan ketahanan dalam menanggulangi kedua ancaman tersebut dan mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan masing-masingnya.

Oleh karena itu pendidikan perdamaian juga menjadi bagian dalam kajian bencana karena timbulnya konflik kekerasan bisa mengganggu harmoni, keberlangsungan hidup suatu masyarakat, menimbulkan rasa takut, memakan korban jiwa dan menyebabkan rusaknya aset-aset penghidupan, serta menyebabkan hilangnya akses ekonomi, sosial dan politik seseorang atau suatu komunitas. Suatu bencana bukan hanya ancaman yang bersumber dari alam, tetapi juga ancaman yang berasal dari situasi sosial yang tidak sehat.

Seiring dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, berbagai bencana sosial modern masuk dalam kajian pengurangan resiko bencana (*disaster risk*

*reduction*). Berbagai bencana sosial itu seperti terorisme, ancaman perang nuklir, konflik kekerasan etnik, perang antar negara dalam memperebutkan sumber daya dapat dikategorikan sebagai bencana yang berpotensi mengganggu keberlangsungan hidup suatu masyarakat.

Perdamaian juga dipahami sebagai suatu keadaan tidak adanya perang atau tidak adanya konflik kekerasan. Dikaji dari faktor penyebab, pemahaman tradisional menyatakan perdamaian akan tercipta ketika individu memiliki rasa kedamaian dalam dirinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi dan pikirannya agar tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain yang bisa memicu terjadinya konflik kekerasan secara terbuka. Perdamaian adalah konsep dan cara pandang seseorang yang positif baik terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain atau lingkungannya.

Bagi sebagian orang pemahaman yang dikemukakan di atas tidak cukup untuk menjelaskan berbagai macam konflik kekerasan yang masih saja terjadi di berbagai belahan negeri ini saat ini. Dalam teori yang lebih modern, damai tidak semata dipahami dari perspektif psikologis individu atau masyarakat. Johan Galtung (2002), misalnya, mendefinisikan perdamaian dalam dua sisi. Pertama, damai yang negatif, yaitu tidak adanya perang atau konflik kekerasan. Situasi ini dapat dicapai dengan pendekatan struktural, yaitu pencegahan setiap potensi konflik dengan cara mengontrol pihak-pihak yang bisa menyulut potensi konflik menjadi konflik terbuka dan menggunakan kekerasan. Kedua, damai yang

positif, yaitu suasana yang sejahtera, adanya kebebasan dan keadilan yang menjadi dasar terciptanya suasana damai yang sesungguhnya dalam suatu komunitas.

Senada dengan Galtung, Franklin (dalam Koten, 2003), berpendapat bahwa damai bukan hanya sekedar tidak adanya perang, tetapi terciptanya keadilan dan hilangnya ketakutan dalam diri individu dan masyarakat. Ketakutan itu timbul karena rasa tidak aman dalam faktor ekonomi, misalnya takut tidak punya pekerjaan atau tempat tinggal yang layak. Franklin lebih jauh menyoroti pada apa yang disebutnya "*sistem yang mengancam*", yaitu sistem yang diciptakan oleh suatu kelompok untuk mengontrol dan mengatur individu atau kelompok lain dengan memberi mereka rasa takut dan ketidakpastian demi mencapai tujuan tertentu. Karena itu agar suasana damai atau perdamaian dapat tercipta di tengah-tengah komunitas maka harus dilakukan upaya untuk memenuhi rasa keadilan dan rasa aman individu atau komunitas, baik aman dari ancaman fisik maupun ekonomi, politik, hukum dan lainnya.

Pendidikan perdamaian dapat mewujudkan nilai, perilaku dan cara hidup yang mendukung terciptanya budaya damai tersebut, yaitu suatu budaya yang mengandung sejumlah nilai, keyakinan, tradisi, perilaku dan gaya hidup, yang berbasis pada prinsip-prinsip non-kekerasan, toleransi, solidaritas, menghargai hak asasi dan kebebasan, dan lebih khusus budaya yang menyediakan ruang untuk partisipasi dan pemberdayaan perempuan.

Dalam aspek lain pendidikan perdamaian bertujuan untuk memberi-

kan pemahaman dan kesadaran tentang akar konflik, kekerasan dan ketidakdamaian dalam lingkup personal, interpersonal, komunitas, nasional, regional dan internasional. Tujuannya pemahaman secara menyeluruh terhadap konflik bisa digunakan sebagai dasar untuk mewujudkan perdamaian dalam suatu komunitas.

### **Restorasi Peradaban Bangsa**

Krisis peradaban bangsa yang dialami bangsa ini jika tidak segera diperbaiki akan mengakibatkan keterpurukan yang lebih dalam dibandingkan keterpurukan yang dialami saat ini. Krisis peradaban dalam bentuk memudarnya nilai-nilai kemanusiaan, kearifan sosial, kecerdasan sosial, dan kompetensi sosial itu sebagaimana ditengarai di awal tulisan ini telah mengakibatkan berbagai krisis yang berkepanjangan dan berkesinambungan.

Menurut Hobbes (dalam Koten, 2003), krisis peradaban yang berpuncak pada berbagai tindakan biadab sangat bertentangan dengan nilai dasar kemanusiaan seperti kekerasan, ketidakadilan, pembunuhan dan sebagainya yang bukan saja telah memutuskan hubungan keharmonisan antara manusia dengan manusia tetapi juga dengan alam dan Tuhan Sang Pencipta, termasuk telah membalikkan peradaban bangsa ini kembali ke zaman primitif di mana naluri kebinatangan tereksresi secara telanjang, karena manusia telah menjadi serigala bagi manusia yang lain (*homo homini lupus*).

Koten (2003), mengistilahkan hubungan manusia dalam peradaban itu hingga kini masih tetap dibangun atas prinsip persaingan dan pengu-

asaan, dengan berbagai predatornya yang menyeramkan. Dalam pandangnya bahwa sejarah manusia hingga kini sesungguhnya adalah sejarah yang penuh luka dan air mata, akibat adanya campur tangan "*manusia-binatang*" dalam kehidupan masyarakat.

Ki Supriyoko (2007) dalam artikelnya tentang pendidikan dan peradaban bangsa menjelaskan pengertian peradaban (*civilization*) sebagai suatu proses penjabaran nilai-nilai kebudayaan yang diwujudkan dalam norma yang kemudian dijadikan satu tolok ukur kepantasan perilaku bagi warga masyarakat pendukungnya. Sementara menurut Koentjaraningrat (1982), peradaban (*civilization*) adalah bagian-bagian dari kebudayaan yang halus dan indah, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, serta sopan santun dan sistem pergaulan yang kompleks dalam suatu masyarakat dengan struktur kompleks. Sedangkan Yusuf al-Qardlawi (2001) merumuskan peradaban sebagai akumulasi fenomena kemajuan materi, keilmuan, seni, sastra, dan sosial, pada suatu kelompok masyarakat, atau pada beberapa masyarakat yang mempunyai kesamaan. Meskipun ketiganya merumuskan pengertian peradaban dari sudut pandang yang berbeda tetapi pada hakekatnya menunjukkan hal yang sama yakni adanya hubungan yang erat antara kebudayaan dengan peradaban. Peradaban merupakan bagian kebudayaan yang halus dan indah dari suatu masyarakat yang terjabar ke dalam nilai-nilai dan norma peradaban masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian suatu bangsa yang memiliki peradaban adalah bangsa yang berkebudayaan,

sedangkan bangsa yang berkebudayaan belum tentu berperadaban.

Peradaban sebagai proses penjabaran nilai-nilai kebudayaan diwujudkan dalam bentuk norma yang kemudian dijadikan satu tolok ukur kepantasan perilaku bagi warga masyarakat pendukungnya. Dalam proses penjabaran itu pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak manusia-manusia pendukung peradaban itu. Dalam kegiatan pendidikan selalu terjadi proses pembudayaan nilai-nilai kepada peserta didik. Nilai-nilai yang baik akan menghasilkan peserta didik yang berbudaya dan berperadaban baik.

Karl Poper (dalam Koten, 2003) menyatakan bahwa sejarah peradaban manusia kini sesungguhnya tidak bisa lagi berjalan secara alamiah. Itulah sebabnya, manakala peradaban suatu masyarakat atau bangsa memudar atau mulai jatuh maka sepantasnyalah perlu segera direkonstruksi atau direstorasi agar peradaban itu dapat pulih dan menempatkan kembali nilai-nilai kemanusiaan pada tempat tertinggi. Proses rekonstruksi yang menempatkan penghargaan tertinggi pada aspek kemanusiaan itulah yang disebut sebagai proses restorasi peradaban.

Dalam pemahaman seperti itu kendatipun suatu bangsa mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi atau kebudayaan (*rasa, karsa, cipta manusia*) yang tampak dalam penguasaan kebudayaan materi yang tinggi tetapi apabila aspek kemanusiaan diabaikan bahkan dilecehkan oleh kebudayaan tersebut sehingga kemanusiaan tidak mendapatkan tempat yang terhormat maka sesungguhnya peradaban bangsa itu

sedang mengalami masalah. Peradaban suatu bangsa memang tidak hanya ditakar pada capaian puncak-puncak kebudayaan material akan tetapi dan bahkan yang terutama adalah pada sejauhmana nilai-nilai kemanusiaan telah mendapatkan perhatian terbaik pada tataran individu, komunitas dan sosietas. Karena itu, perjuangan untuk merestorasi peradaban yang berkemanusiaan itu, pertama-tama yang harus dikalahkan adalah "*kebiadaban naluri kebinatangan dalam diri manusia itu sendiri.*"

Bagaimana sebaiknya proses restorasi peradaban yang berkemanusiaan itu berlangsung? Mudji Sutrisno (1993), menyatakan bahwa sesungguhnya proses peradaban itu harus dibangun ke peradaban yang berkemanusiaan, yakni suatu proses manusia, yang dengan kendaraan peradaban mau semakin menaruh hormatnya pada sesama manusia dalam ruang lingkungan bersama.

Untuk itulah sesungguhnya restorasi peradaban bangsa yang berkemanusiaan selalu mengingatkan kita untuk menyadari bahwa semua pertanyaan mendasar tentang peradaban adalah sumbangan apa yang bisa diberikan untuk kesejahteraan dan menciptakan rasa aman dan damai bagi manusia seluruhnya? Sejauh mana masyarakat sebuah bangsa dapat saling menghargai satu sama lain untuk tetap menjaga harga diri atau martabatnya lewat pengikisan ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, ketidakadilan hukum, ketidakadilan gender dan sebagainya.

Ketika dikatakan bahwa kekerasan, ketidakadilan, pembunuhan dan sebagainya sebagai pemutusan hubungan keharmonisan antara manusia,

alam semesta dan Tuhan Sang Pencipta, maka proses restorasi peradaban yang berkemanusiaan mengundang kita untuk menyadari kembali siapakah manusia dalam hubungan dengan sesama, alam semesta dan Sang Pencipta. Dalam konteks itu sesungguhnya bahwa manusia adalah makhluk yang terluhur bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain di dunia.

Keluhuran martabat manusia itu terletak dalam kesadarannya mengusahakan cinta atau kesanggupannya untuk mencintai sesama. Seperti yang diungkapkan Mencius (dalam Koten, 2003) bahwa yang membedakan manusia dari makhluk hidup lain sebenarnya tampaknya kecil, yakni adanya cinta ilahi yang memberi kesadaran kepada manusia. Namun cinta ilahi itulah yang merembes ke hati manusia, dan yang membawa kebijaksanaan dan kesadaran ilahi sehingga manusia tidak hanya sanggup untuk ada seperti makhluk hidup lain, tetapi juga bisa meniru sifat-sifat *ilahi* dan sifat-sifat *dunia* dalam mencintai, memberi dan menghimpun makhluk-makhluk ciptaan lain menuju kesatuan besar dalam kosmos ini. Oleh karena itu restorasi peradaban yang berkemanusiaan haruslah berpangkal pada upaya saling menghargai dan saling menghormati dan bertindak jujur terhadap sesama, alam semesta dan Tuhan Sang Pencipta.

Peradaban yang berkemanusiaan itu akan dapat diraih apabila kemampuan berpikir suatu bangsa sudah mencapai taraf yang tinggi. Seperti yang dikatakan para ahli bahwa kesempurnaan manusia sangat ditentukan oleh ketinggian pemikirannya. Dengan kata lain, peradaban

yang berkemanusiaan hanya akan tumbuh jika manusia di dalamnya memiliki pemikiran yang tinggi sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupannya. Namun demikian, suatu pemikiran tidak dapat tumbuh begitu saja tanpa sarana dan prasarana ataupun supra-struktur dan infrastruktur yang tersedia. Dalam hal ini pendidikan merupakan sarana penting bagi tumbuhnya pemikiran tersebut.

Melalui pendidikan kita dapat membangun peradaban bangsa yang unggul dan mulia, peradaban yang memiliki nilai kemanusiaan, jati diri dan karakter bangsa yang luhur dan terhormat. Melalui pendidikan juga kita dapat meningkatkan semangat dan etos kerja sebagai bangsa yang kuat dan gigih. Lebih dari itu melalui pendidikan perdamaian kita dapat membangun peradaban yang menghadirkan persaudaraan dan kerukunan bangsa, serta memelihara kelestarian alam. Melalui pendidikan perdamaian kita diajarkan menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah dengan mengedepankan cara-cara yang damai, beradab dan demokratis, bukan dengan cara-cara kekerasan dan mengabaikan pranata sosial dan pranata hukum. Apabila kita mampu melakukan itu semua maka Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, betapapun beratnya, apapun bentuknya, dan dari manapun datangnya.

### **Penutup**

Restorasi peradaban bangsa akan efektif apabila dilakukan melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan yang mampu meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, kearifan sosial, kecerdasan sosial dan kompetensi sosial. Pendidikan demikian itu

adalah pendidikan yang menanamkan budaya damai dan menciptakan perdamaian, sehingga disebut pendidikan perdamaian atau *peace education*.

Pendidikan perdamaian diyakini mampu meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, kearifan sosial, kecerdasan sosial dan kompetensi sosial karena bertujuan mewujudkan nilai, perilaku dan cara hidup yang mendukung terciptanya budaya damai. Budaya damai adalah sejumlah nilai, keyakinan, tradisi, perilaku dan gaya hidup yang berbasis pada prinsip-prinsip non-kekerasan, toleransi, solidaritas, menghargai hak asasi dan kebebasan. Budaya seperti itu menjunjung tinggi harmoni, toleransi, saling menghargai dan relasi yang setara antar individu yang hidup bersama dalam suatu komunitas atau masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- Alfian. A.M. 2007. *Restorasi Peradaban Bangsa*, Jakarta, Akbar Tandjung Institute dan Universitas Nasional.
- Al-Qardlawi, Yusuf, *Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Azar. E. 2000. *Protracted Social Conflict*. dalam Miall, Hugh; Woodhouse. Tom and Oliver Ramsbotham. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Bahari. Yohanes. 2009. *Urgensi dan Signifikansi Kompetensi Sosial dan Pendidikan Multikultural*, Sintang, Makalah diseminarkan, Prodi Pendidikan Sosiologi dan Pusat Penelitian Resolusi Konflik dan Perdamaian Untan.
- . 2006. *Revitalisasi Pancasila Sebagai Way of Life, Jati Diri Bangsa dan Ideologi Negara di Tengah Dekadensi dan Separatisme Ideologi Dalam Era Reformasi dan Globalisasi*, Pontianak, Makalah diseminarkan, DPD PIKI Kalbar.
- . 2008. *Benarkah Nilai-Nilai Agama Sebagai Sumber dan Perikat Perdamaian*, Pontianak, Makalah diseminarkan dalam Seminar FORDIALAM Kalbar.
- Carnegie. 2005. dalam Suyono. Hadi. 2007. *Social Intelligence: Cerdas Meraih Sukses Bersama Orang Lain dan Lingkungan*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.
- Chang.W. 2006. *Mengembangkan Kecerdasan Sosial*. Kompas 8 Agustus, 2006.
- Danesh. HB. 2002. *Education for Peace: Breaking The Cycle of Violence*. Paper presented at: African Civil Society Organization and Development: Re-evaluation for the 21st century, New York, Office of Social and Economic Development, United Nations.
- Danesh. HB & Danesh RP. 2004. *Conflict-Free Conflict Resolution (CFCR): Process and Methodology*, *Peace and Conflict Studies*, International Journal of Peace Studies, New York.
- .2002a. *Has Conflict Resolution Grown Up?: Toward a New Model of Decision Making and Conflict Resolution*, International Journal of Peace Studies, New York.

- 2002b. A  
*Consultative Conflict Resolution Model: Beyond Alternative Dispute-Resolution*, International Journal of Peace Studies, New York.
- Darmaputera. Eka. 1990. *Pergumulan Dan Peran Gereja Dalam Masyarakat Dan Negara Pancasila*, dalam *Tegar Mekar di Bumi Pancasila*, Buku Peringatan 40 Tahun PGI, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Franklin. Ursula. Dalam Koten. Thomas. 2003. *Humanisasi Peradaban*, The Justice Advocates Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan.
- Galtung. Johan. 2002. *Kekerasan Kultural*. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif. Yogyakarta: Insist Press.
- 2001. *Kekerasan Budaya*. Dalam Thomas Santoso. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- 1996. *Peace By Peaceful Means: Peace and Conflict Development and Civilization*. IPRIO: Institute Peace Research Oslo-OSLO. London. Sage Publications.
- Goleman. D. 1996. *Emotional Intelligence. Kecerdasan Emosi, Mengapa EI Lebih Penting dari IQ*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gardner. H. 2003. *Multiple Intelligence. Kecerdasan Majemuk Teori dalam Praktek*. Batam, Interaksara.
- Harron. 1998. *Alternative Disute Resolution*. dalam Merthaman. 2002. *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Antara Masyarakat Pendetang Dengan Masyarakat Lokal*. Bandung. PPS Unpad.
- Hodgson. Marshall G. S. 1974. *The Venture of Islam*, Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Idi. Abdullah, dan Suharto. Toto. 2006. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Kata Pengantar: Prof. Dr.H.J. Suyuthi Pulungan, M.A, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kiyosaki. T. Robert. 1998. *Rich Dad's The Bussiness School, For People Who Like Helping People*, Tech Press. Inc. In Association with CASHFLOW Technologies. Inc.
- Khilstrom F.J. and Cantor. N. 2000. *Social Intelligence*. Socrates Barkeley.Edu. July 2000.
- Koentjaraningrat. 1982. *Kebudayaan, Mentalitas, Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.
- Koten. Thomas. 2003. *Humanisasi Peradaban*, The Justice Advocates Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan.
- Kraybill.S.Ronald, Evans F.Alice, Evans A.Robert. 2002. *Peace Skills: Panduan Mediator, Terampil Membangun Perdamaian*, Yogyakarta. Penerbit Kanisius.
- Lembaga Alkitab Indonesia. 2006. *Injil Lukas dan Kitab Roma*, Jakarta.
- Martani W. Dan Adiyanti M.G. 1991. *Kompetensi Sosial dan Kepercayaan Diri Remaja*, Jurnal Psikologi I, 17-20.
- Mendiknas RI. 2002. *Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 042/U/2002*, Jakarta.
- Menkumham RI. 2010. *LAPAS, Kelebihan Daya Tampung*,

- Kompas, 14 Februari 2010, Jakarta.
- Moss K dan Hunt C. dalam Suyono. Hadi 2007. *Social Intelligence: Cerdas Meraih Sukses Bersama Orang Lain dan Lingkungan*. Yogyakarta. Ar Ruzz Media.
- Poper. Karl. dalam Koten. Thomas. 2003. *Humanisasi Peradaban, The Justice Advocates Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Pranowo. 2006. *Reaktualisasi Pancasila Sebagai Jatidiri Bangsa dan Ideologi Negara*, Makalah Seminar Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia, Jakarta.
- Schwarz. Adam. 2004. *A Nation in Waiting Indonesia's Search for Stability*. Talisman Publishing, Singapore.
- Sinamo H.J. 2005. *Sukses dan Kecerdasan*, Pembelajar. Com, 8 Agustus 2006.
- Supriyoko. Ki. 2007. *Bahan Kuliah Politik Pendidikan Nasional*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sessi ke-11.
- Suyono. Hadi. 2007. *Social Intelligence: Cerdas meraih Sukses Bersama Orang Lain dan Lingkungan*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.
- Tilaar, H.A.R., *Perubahan Sosial dan Pendidikan*.(Jakarta: Grasindo, 2002)
- Thorndike. 1920. dalam Suyono. Hadi. 2007. *Social Intelligence: Cerdas meraih Sukses Bersama Orang Lain dan Lingkungan*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.
- Yani D. 2002. *Kecerdasan Sosial Anak Butuh Dukungan Keluarga*, Suara Merdeka, 8 Agustus 2006.
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta.
- Vernon P.E. 1971. *The Structure of Human Abilities*. London. Methuen.
- Zohar D dan Marshal I. 2000. *SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spritual dalam Berfikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan*, Bandung. Mizan.